



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

- Nama : ANNA TRININGSIH
- Jabatan : ASISTEN AHLI HAKIM KONSTITUSI AHLI MADYA
- NHK : 142260

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.540.000.000

- Tanah Seluas 580 m2 di KAB / KOTA INDRAMAYU, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/85 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.100.000.000
- Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA LAHAT, WARISAN Rp. 40.000.000
- Tanah Seluas 622 m2 di KAB / KOTA INDRAMAYU, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 136.000.000

- MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
- MOBIL, HONDA NEW BRIO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 103.100.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 172.200.860

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 115.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.066.300.860

III. HUTANG

Rp. 1.120.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.946.300.860

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.